



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

24 Juli 2018

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
3. Para kepala Puskesmas Kelurahan
Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
di -
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor : 60 /SE/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
KAWASAN DILARANG MEROKOK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok, maka kami sampaikan informasi sebagai berikut :

1. Kepada para Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk :
 - a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya.
 - b. Melaporkan hasil pengawasan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta setiap bulannya yang ditembuskan kepada Wakil Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta

- c. Memberikan teguran tertulis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak menegakkan peraturan kawasan dilarang merokok.
 - d. Melakukan pembinaan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak menegakkan peraturan kawasan dilarang merokok.
2. Kepada para Kepala Puskesmas Kecamatan untuk :
- a. Membantu Suku Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya.
 - b. Melaporkan hasil pengawasan kepada Suku Dinas Kesehatan masing-masing setiap bulannya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



dra. Khafifah Any, Apt, MARS
NIP 196006031989032001

Tembusan

- 1. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.